

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.²¹ Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan.

²¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm. 8.

Dengan demikian, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.²² Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) diartikan sebagai perhitungan index pembangunan sosioekonomi nasional, kombinasi perhitungan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.²³

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembangunan manusia, baik dari aspek fisik (seperti kesehatan dan standar hidup yang layak) maupun aspek non-fisik (seperti tingkat pengetahuan). Pembangunan yang memengaruhi kondisi fisik masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup dan daya beli mereka, sementara dampak non-fisik dapat dinilai dari mutu pendidikan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang dapat digunakan untuk melihat melihat efek dari pembangunan di suatu wilayah dengan cakupan yang sangat luas, karena mencerminkan kualitas penduduk di wilayah tersebut berdasarkan umur harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak.²⁴

²² Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia 2020*, (Jakarta: BPS, 2020), hlm 5.

²³ A. Jajang W. Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 299.

²⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*, (Jakarta: BPS, 2008), hlm 9.

b. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan setandar hidup layak.²⁵

1) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup dihitung dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum harapan hidup sesuai standar UNDP. Standar ini menetapkan batas atas indeks harapan hidup pada usia 85 tahun, sementara batas terendahnya adalah 20 tahun. Dalam menghitung indeks ini, angka tertinggi dan terendah tersebut digunakan sebagai patokan.²⁶

²⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm 122.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dihitung berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama. Kedua indikator ini kemudian digabungkan untuk membentuk indeks pendidikan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Sementara itu, Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP.

Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0.²⁷

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Untuk mengukur standar hidup layak Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebesar Rp 26.572.352 sedangkan batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.²⁸

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Kuncoro, faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia antara lain:²⁹

1) Kemiskinan

Sebagian besar warga miskin mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk kebutuhan pangan, sehingga kebutuhan lainnya tidak dapat terpenuhi secara konseptual. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi dan intervensi pemerintah guna membantu mengatasi kemiskinan,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁹ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2003), hlm. 266-267.

meningkatkan produktivitas rendah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam semua sektor ekonomi di suatu wilayah. PDRB sering dikaitkan dengan pembangunan manusia, yang mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan pembangunan manusia. Mengukur pendapatan domestik regional bruto membantu dalam mengevaluasi sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mempengaruhi pembangunan manusia melalui aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemerintah dan rumah tangga.

3) Pengangguran

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana individu yang merupakan bagian dari angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan, tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Memperluas lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mendukung pencapaian peningkatan pembangunan manusia, baik di negara maju maupun berkembang.

Menurut UNDP untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:³⁰

- 1) Produktivitas, di mana manusia harus meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi IPM sebuah Negara.
- 2) Pemerataan, di mana manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus sehingga manusia dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Secara sosial ekonomi zakat merupakan instrumen yang mempunyai efek yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Ilham, bahwa Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di 19 provinsi Indonesia periode tahun 2014

³⁰ Darwin Hartono, *Ekonomi Pembangunan: Membangun Pembnagunan Manusia* (Jakarta: CV. Mitra Cendikia Media, 2021), hlm. 5.

hingga 2017. Hal ini berarti bahwa ketika dana ZIS dikelola secara baik dan optimal serta didistribusikan tepat sasaran, maka kualitas pembangunan manusia meningkat.³¹ Zakat yang secara konsisten dilakukan dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara Muslim juga menjembatani kesenjangan di masyarakat.³² Zakat juga merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.³³ Dengan demikian zakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia sebuah Negara.

- 3) Kestinambungan, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
- 4) Pemberdayaan, di mana manusia harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk atau arah kehidupannya serta berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

³¹ Ilham, "Analisis Pengaruh ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan Dan PDRB Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 19 Provinsi Indonesia Periode 2014-2017."

³² Syukri and Gunawan, "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mustahik (Studi Kasus: Baitul Mal Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1, no. 2 (2020), hl. 80-97.

³³ Deny Setiawan, "Profesi Dalam Perdagangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011), hlm. 195–208.

d. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:³⁴

1) Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup
 AHH_{min} = Angka Harapan Hidup Minimum
 AHH_{maks} = Angka Harapan Hidup Maksimum

2) Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah
 HLS_{min} = Harapan Lama Sekolah Minimum
 HLS_{maks} = Harapan Lama Sekolah Maksimum
 RLS = Rata-rata Lama Sekolah
 RLS_{min} = Rata-rata Lama Sekolah Minimum
 RLS_{maks} = Rata-rata Lama Sekolah Maksimum

³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia 2015*, (Jakarta: BPS, 2015), hlm 126-127.

3) Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436 ^a	26.572.352 ^b

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

Keterangan :

a : Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

b : Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM : \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Setiap indeks Komponen IPM dalaha hasil perhitungan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dengan nilai minimumnya, dibagi dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum yang bersangkutan. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$IPM = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{X_{(i)maks} - X_{(i)min}} \times 100$$

Dimana:

$X_{(i)}$: Indikator ke-I (i= 1, 2, 3)

$X_{(i)maks}$: Nilai maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i)min}$: Nilai minimum $X_{(i)}$

c. Teori Pembangunan Manusia (*Human Capital Theory*)

Human capital adalah istilah yang terbentuk dari dua kata dasar, yaitu manusia dan modal. Modal di sini merujuk pada faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa tanpa menghabiskannya selama proses produksi. Dalam konteks definisi modal tersebut, manusia dalam *human capital* dianggap sebagai bentuk modal, sebanding dengan mesin dan teknologi. Manusia juga memainkan peran penting serta memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan transaksi.³⁵ Seiring dengan perkembangan teori ini, gagasan tentang human capital dapat dijelaskan melalui tiga konsep. Pertama, *human capital* dipandang sebagai aspek individual. Dalam konteks ini, human capital diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu, seperti pengetahuan dan keterampilan. Rastogi pada tahun 2002 lebih lanjut menjelaskan bahwa *human capital* mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki

³⁵ Afid Nurkholis, "Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory" (2016), hlm. 1–16.

oleh manusia.³⁶

Konsep kedua menekankan bahwa *human capital* merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Menurut pendekatan ini, *human capital* merupakan hasil dari akumulasi proses tertentu, seperti yang disebutkan oleh Alan dan rekan-rekannya pada tahun 2008. Dalam konsep ini, *human capital* dianggap tidak berasal dari pengalaman manusia.

Sementara itu, konsep ketiga memandang *human capital* dari sudut pandang orientasi produksi. Menurut Romer, *human capital* merupakan salah satu sumber fundamental produktivitas ekonomi. Manusia berinvestasi dalam *human capital* untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti yang diungkapkan oleh Rosen pada tahun 1999. Frank dan Bernanke, berpendapat bahwa *human capital* melibatkan kombinasi dari pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi, dan inisiatif yang secara bersama-sama memengaruhi produktivitas manusia.

Menurut Todaro, seseorang dapat mengukur modal manusia melalui tingkat pendidikan dan kesehatannya. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh individu dapat menjadi nilai tambah bagi mereka. Konsep ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin banyak pelatihan

³⁶ *Ibid.*

yang diikuti seseorang, maka kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya akan meningkat. Di sisi lain, kesehatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan. Meskipun seseorang memiliki pendidikan tinggi, jika kondisi kesehatannya buruk, hal ini tidak akan meningkatkan produktivitasnya. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran individu akan pentingnya kesehatan.³⁷

Dalam teori human capital, ada dua pendekatan utama: pendekatan Nelson-Phelp dan pendekatan Lucas. Menurut Agion dan Howitt, pendekatan Nelson-Phelp menyatakan bahwa human capital memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mereka mengemukakan bahwa perbedaan dalam tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya memiliki angkatan kerja yang terdidik, karena mereka cenderung lebih mampu menghadapi tuntutan pekerjaan yang kompleks. Dengan kata lain, pekerja yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih responsif terhadap inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan stock human capital dapat meningkatkan pendapatan

³⁷ *Ibid.*

suatu negara melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang mereka miliki.³⁸

Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah proses bertahap dalam jangka panjang, melibatkan berbagai faktor sosial dan ekonomi. Proses ini melibatkan interaksi antara berbagai sektor dari masa tradisional hingga modern, seperti yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai standar untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia.³⁹

d. Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam

Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam versi Anton bahwasanya konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi Islam berbeda dengan konvensional. Tujuan pembangunan di dalam Islam baik untuk tujuan dunia dan akhirat disebut dengan *falah* yang melindungi agama, kehidupan, pikiran, kekayaan dan keturunan manusia.

Dengan demikian, pembangunan manusia dalam perspektif Islam juga harus mengikuti *maqashid syariah* tersebut. Kata *falah* dan turunannya disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur'an. Kata

³⁸ Sopan Andrianto, *Memposisikan Human Capital Dalam Pencapaian Menuju Indonesia Tangguh Dan Tumbuh* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), hlm. 55.

³⁹ *Ibid.*

lain *fawz* sebagai sinonim dari *falah* telah digunakan sebanyak 29 kali beserta turunannya. Hal ini juga yang dikumandangkan oleh muazin untuk memanggil orang untuk melaksanakan salat sebanyak 5 kali dalam sehari, menunjukkan begitu pentingnya menggapai *falah* dalam pandangan Islam. Pentingnya sebagai tujuan manusia di dunia ini menjadi landasan dasar bahwa manusia harus menjaga amanah untuk memelihara alam dan seisinya sebagai tuntutan tugasnya sebagai khalifah.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 72 sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ (الاحزاب/33: 72)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh." (Q.S. al-Ahzab [33]: 72).⁴¹

Berdasarkan *maqashid syariah*, konsep Islam dalam pembangunan manusia berpusat pada dua aspek, yaitu material dan moral. Islam mengenal dua kebutuhan manusia, yaitu keduniaan dan spiritual. Keduniaan diartikan sebagai konsumsi yang sifatnya materi dan fasilitas untuk memproduksinya sebanyak- banyaknya. Sementara itu, spiritual adalah moral, etika, dan aspek sosial dalam kehidupan. Secara Islam hal tersebut diperbolehkan dengan diizinkan dan

⁴⁰ Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam.*, hlm. 306.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

diekspresikan sepenuhnya untuk memenuhi desakan kemanusiaan dengan pilihan secara moral dan ideal, etika dan sosial, serta cara untuk meraihnya. Untuk mewujudkannya diperlukan pengorbanan yang tinggi. Kedua jenis kebutuhan tersebut bisa menjadi sesuatu konflik, pada dasarnya saling berhubungan untuk mempertahankan keberadaan manusia.⁴²

Konsep maqashid yang digunakan untuk pengukuran *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berbeda dengan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pengukuran IPM, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, masih bersifat dharuriyat atau primer. Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI) ditambah dengan indeks religiusitas, yaitu *hifz al din*.⁴³

2. Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik).⁴⁴ Definisi zakat sebagai madah (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm [53] ayat 32 yang berbunyi:

⁴² Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam...*, hlm. 307.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dina Mariana, *Fikih Zakat, DIRAH* (Parepare: Dirah, 2017), hlm. 2.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾ (النجم/53: 32)

Artinya: “ (Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”. (Q.S. An-Najm [53]: 32).⁴⁵

Adapun, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dilihat pada Q.S. Asy-Syams [91] ayat 9 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ (الشمس/91: 9)

Artinya: “sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”. (Q.S. Asy-Syams [91]: 9).⁴⁶

Kata *zakā* terbentuk kata *tazkiyah*, atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci" dan "berkah". Adapun menurut Ibnu Hajar Al'Asqalani, tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁴⁶ *Ibid.*

muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.⁴⁷

2) Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat.⁷ Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur [24] ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ (التور/24: 56)

Artinya: "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati". (Q.S. An-Nur [24]: 56).⁴⁸

Dalam ayat lain, Allah berfirman pada QS. At-Taubah [9] ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة/9: 56)

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah [9]:

⁴⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 2.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

103).⁴⁹

3) Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan penyaluran zakat kepada (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran dana zakat merupakan aspek penting dalam manajemen pelaksanaan zakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, manajemen pelaksanaan zakat diartikan sebagai langkah-langkah perancangan, implementasi, dan koordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Tujuan dari manajemen pelaksanaan zakat mencakup: 1) meningkatkan efektivitas dan kemampuan layanan dalam pengelolaan zakat, 2) menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memberikan bantuan kepada masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.⁵⁰

Zakat harus disalurkan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penyaluran zakat, sesuai dengan Pasal 25, dilakukan dengan memperhatikan tingkatan prioritas dan tetap mematuhi prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Kewenangan pengumpulan zakat melibatkan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, yang diatur dalam peraturan pemerintah.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Supardi et al., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023), hlm. 1–10.

⁵¹ *Ibid.*

Pendistribusian zakat merujuk pada proses di mana lembaga zakat membagikan dana zakat kepada 8 asnaf. Terdapat beberapa metode pendistribusian zakat yang bertujuan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif, yaitu:⁵²

- a) Konsumtif tradisionial yaitu zakat dibagi kepada asnaf dengan secarah langsung untuk kebutuhan komsumsi sehari-hari.
- b) Konsumtif kreatif yaitu zakat yang mewujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan dipakai untuk membantu orang miskin dalam menangani permasalahan sosial dan ekonnomi yang dihadapinya.
- c) Produktif konvesional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang boleh digunakan untuk mencapai sesuatu usaha yang berkepanjangan
- d) Produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pendirian sekolah, sarana kesejahteraan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha.

⁵² M Mutmainna, Muhammadiyah, and Haerana, "Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2019), hlm. 227–243. Diakses melalui <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>. pada tanggal 26 Otober 2023.

4) Manfaat Zakat

Menurut Hafidhuddin zakat mengandung hikmah dan manfaat besar bagi muzaki, mustahik, hart abenda yang dikeluarkan zakatnya dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat zakat yaitu:

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.
- b) Zakat adalah hak mustahik, kemudian peran zakat adalah membantu dan membina mereka terpenting kaum duafa sehingga dapat hidup lebih baik.
- c) Sebagai pilar kebaikan bersama dengan orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt.
- d) Sebagai sumber pendanaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dipunyai umat muslim, seperti fasilitas ibadah, pendidikan, dan kesehatan.
- e) Sebagai memasyarakatkan budi pekerti dalam berbisnis yang benar.
- f) Jika zakat dikelola dengan tepat, memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.⁵³

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-14.

b. Infaq dan Shadaqah

1) Pengertian Infaq dan Shadaqah

Menurut bahasa, infak diartikan sebagai memberikan harta, sedangkan menurut istilah merupakan memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Sedangkan menurut Undang-Undang, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁴ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S al-Anfal [8] ayat 36, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۗ (الأنفال/8: 36)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan". (Q.S al-Anfal [8]: 36).⁵⁵

Adapun pengertian shadaqah menurut bahasa berasal dari lapadz صدق - يصدق - صدقاً yang artinya benar, sedangkan menurut istilah, shadaqah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah Swt. Adapun menurut Undang-undang, shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau

⁵⁴ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm-34.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁶ Sedangkan dalam Al-Qur'an, shadaqah itu bermakna zakat maal, seperti dalam Q.S at-Taubah [9] ayat 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S at-Taubah [9]: 60).⁵⁷

Dengan demikian, shadaqah lebih khusus daripada infaq. Shadaqah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi shadaqah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman.⁵⁸

2) Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Adapun perbedaan dari Zakat, Infaq, dan Shadaqah yaitu jika zakat adalah dikeluarkannya harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sedangkan infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau

⁵⁶ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 4-6

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁵⁸ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer...*, hlm. 6

pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa saja, Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya, namun, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.⁵⁹

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan PDRB Per Kapita adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk disuatu wilayah, dihitung dengan membagi total PDRB wilayah tersebut dengan penduduknya.

⁵⁹ Yuswar Z.B et al., *Zakat, Infak, Sedekah Dan Akuntansinya Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hlm. 9-10.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.⁶⁰

b. Pendekatan Produk Domestik Regional Bruto

Tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- 1) Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 2) Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 3) Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi

⁶⁰ Sandra Logaritma, *PDRB Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha* (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2008), hlm. 5-6.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

c. Manfaat data Produk Domestik Regional Bruto

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:⁶²

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya
- 2) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan
- 3) Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

⁶² *Ibid.*, hlm. 7-8.

- 5) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

d. Produk Domestik Regional Bruto dalam Perspektif Islam

Ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai dalam analisa ekonomi, misalnya menjadikan nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan sebagai dasar penelitian ekonomi. Fluktuasi nilai tambah dalam PDB atau PDRB menjadi indikator kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi suatu negara atau daerah. Namun dalam sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) Islam yang menjadi indikator kesejahteraan adalah tercapainya *falah*(*real welfare*) dalam segala kegiatan perekonomian. Untuk mencapai *falah* dalam perekonomian, diperlukan motor penggerak, salah satunya adalah sektor produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sektor produksi berperan sebagai penggerak utama pembangunan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menciptakan permintaan untuk faktor produksi lainnya.⁶³

Dalam konteks ekonomi Islam, produksi diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga aspek moralitas. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan *falah* dalam menilai kesejahteraan, penting juga untuk memasukkan instrumen lain seperti zakat, wakaf, dan sedekah

⁶³ Indra Mariana. Wiwik, "Pengaruh Produk Domesti Regional Bruto Terhadap Tingkat Penaggguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Indragiri Hilir Tahun 2013-2019)," *Al-Hasyimiyah* (2019), hlm. 70–83.

dalam perhitungan ekonomi.⁶⁴ Dengan demikian, PDRB dalam perspektif ekonomi Islam dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk fisik semata, tetapi juga melibatkan peningkatan moralitas masyarakat di suatu daerah.

4. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.⁶⁵ Adapun tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang disebutkan dalam bentuk presentasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi pengangguran merupakan mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Pengangguran sering dihubungkan dengan istilah angkatan kerja penduduk usia kerja di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi orang-orang yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sering disebut pengangguran terbuka, dengan

⁶⁴ Nurul Huda et a., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 32.

⁶⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 13.

batas usia minimal 15 tahun sesuai standar internasional. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja mencakup mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan lain-lain.⁶⁶

Sedangkan, Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁶⁷

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

- a) Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*), Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. Adapun rumusnya sebagai berikut:

⁶⁶ [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=26). Istilah, 2023. Diakses melalui https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=26. Pada tanggal 3 Oktober 2023.

⁶⁷ [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1). Tingkat Pengangguran Terbuka, 2020. Diakses melalui https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1. Pada tanggal 3 Oktober 2023.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

- b) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*), yaitu Bekerja penuh (*employed*) yang merupakan orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu dan setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.⁶⁸

b. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno, ditinjau dari penyebabnya pengangguran dapat digolongkan kepada empat jenis pengangguran, yaitu:⁶⁹

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.

2) Pengangguran siklikal

Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi.

3) Pengangguran struktural

Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.

⁶⁸ Herman, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Upah Minimum Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pekanbaru Tahun 2010-2017," *Relasi : Jurnal Ekonomi* 15, no. 2 (2019), hlm. 223.

⁶⁹ Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 328-329.

4) Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

Selain itu, Sukirno juga mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, yang dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁷⁰

- a) Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b) Setengah Menganggur (*Under Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c) Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
- d) Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pengangguran ini terjadi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 330-331

karena perubahan musim yang menyebabkan para tenaga kerja tidak dapat bekerja.

Dalam penelitian ini, fokusnya lebih spesifik pada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merujuk kepada mereka yang berada dalam angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan masih aktif mencari pekerjaan.

c. Dampak Pengangguran

Dampak buruk dari pengangguran terhadap perekonomian, antara lain:⁷¹

- a) Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena mereka kehilangan mata pencaharian.
- b) Laju tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, karena daya beli masyarakat ikut turun dan akan menimbulkan kelesuan pengusaha untuk berinvestasi.
- c) Penerimaan-penerimaan dalam bentuk pajak akan berkurang, karena tingkat kegiatan ekonomi rendah, objek pajak akan sempit dan sumber penerimaan negara akan berkurang.
- d) GNP aktual yang dicapai lebih rendah dari GNP potensial, karena faktor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal.

⁷¹ Moh Faizin, *Ekonomi Makro Islam* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 150.

d. Konsep Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang memenuhi persyaratan dan berupaya mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dalam perspektif ini, pengangguran mencakup aspek ekonomi dan sosial. Sebagai anggota masyarakat Islam, individu memiliki kewajiban moral untuk mencari pekerjaan dan mencari nafkah secara halal. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami pengangguran, hal ini dianggap sebagai ketidakberhasilan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam ekonomi Islam, pengangguran juga dianggap sebagai suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana sumber daya ekonomi harus digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pengangguran dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan sosial, sehingga menjadi suatu masalah yang perlu diatasi.⁷²

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang sangat relevan dalam mengatasi masalah pengangguran. Pertama, Islam menekankan pentingnya usaha keras dan produktivitas dalam mencari nafkah yang halal. Ini berarti setiap individu diharapkan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Dalam konteks ini, pengangguran dapat diatasi dengan

⁷² Eko Sudarmanto, *Ekonomi Makro Islam* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 148.

memotivasi individu untuk terus berusaha dan mencari peluang pekerjaan.⁷³

Kedua, Islam mendorong solidaritas sosial dan kerjasama antarindividu dan komunitas. Dalam hal ini, membantu sesama muslim yang mengalami pengangguran menjadi kewajiban sosial. Prinsip saling membantu, memberikan zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan sedekah (sumbangan kasih sayang) adalah cara-cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mendukung orang-orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang menganggur. Bantuan ini dapat memberikan mereka kesempatan untuk memulai usaha kecil atau mengembangkan keterampilan agar dapat mendapatkan pekerjaan.

Ketiga, dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Ini mencakup distribusi kekayaan dan peluang kerja yang merata di masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam perekonomian.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat Muslim diharapkan dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan bantuan, dukungan, dan peluang yang merata,

⁷³ *Ibid.*

diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁴

5. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, termasuk makanan dan non-makanan, yang disebut sebagai garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan jumlah uang yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membeli makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per orang per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan barang serta jasa lainnya.⁷⁵

Menurut N.H.T Siahaan, kemiskinan adalah kondisi sosial di mana kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara memadai dari hari ke hari. Hal ini mencakup sulitnya akses terhadap pangan, gizi yang tidak mencukupi, air yang tidak memenuhi standar kesehatan, kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, pelayanan sosial yang

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 149.

⁷⁵ Dewi Fatmasari, *Ekonomi Pembangunan* (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 46.

tidak memadai, kendala dalam transportasi, dan berbagai masalah lainnya. Sementara menurut Emil Salim, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga menyebabkan ketidakstabilan, penderitaan, atau kekurangan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁶

b. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:⁷⁷

- 1) *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

c. Konsep-Konsep Kemiskinan

Menurut Saratha dan Noor dalam Sapadi dan Achmad Rozany, kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan atas tiga

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2009, (Jakarta: BPS, 2009), hlm. 35-36.

pengertian, yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif.⁷⁸

- 1) Kemiskinan subyektif, setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin, kemiskinan subyektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (*wants*) dengan kebutuhan (*needs*).
- 2) Pengertian kemiskinan absolut adalah kondisi jika seseorang atau keluarga memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien.
- 3) Pengertian kemiskinan relatif berkaitan dengan *konsep relative deprivation* jika kemampuan pemenuhan kebutuhan seseorang atau sebuah keluarga berada dalam posisi relatif terhadap anggota masyarakat lain yang tinggal dalam satu wilayah Konsep ini terkait erat dengan ketimpangan pendapatan.

c. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat.⁷⁹ Allah SWT menggunakan istilah itu dalam firman-Nya Q.S al-Balad [90] ayat 16, yang berbunyi:

⁷⁸ Mohd Yusri, *Integrasi Kebijakan Regional Dan Kemiskinan* (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 12-13.

⁷⁹ Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2014), hlm. 101.

لَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ (البلد/90: 16)

Artinya: " atau orang miskin yang sangat membutuhkan". (Q.S al-Balad [90]: 16).⁸⁰

Adapun menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian: 1) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materiel dan 2) kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. Argumen serupa juga dibuat oleh Ahmed, mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam, menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan urusan duniawi.⁸¹

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam terdapat dalam QS Ar Ruum [30] ayat 41. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terdapat dalam QS Ali Imran [3] ayat 180. Ketiga,

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁸¹ Nurul Huda et al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 23.

kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil terdapat dalam QS At Taubah [9] ayat 34. Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa terdapat dalam QS Al Qashash [28] ayat 1-88. Kelima, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba terdapat dalam QS Saba' [34] ayat 14- 15.⁸²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi referensi dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nadia Solihah Fatimatuzzahro (2022) ⁸³	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat Tahun	Regresi Data Panel	Dari hasil penelitian tersebut bahwa variabel PDRB dan variabel Belanja daerah dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap

⁸² *Ibid.*

⁸³ Sholihah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021." (Skripsi), Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

		2016-2021		variabel Indeks Pembangunan Manusia dan berhubungan positif. Sedangkan variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia akan tetapi berhubungan negatif. Dan variabel ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
	Persamaan:	<p>a. Menggunakan regresi data panel.</p> <p>b. Menggunakan lokasi penelitian yang sama.</p> <p>c. Menggunakan variabel PDRB sebagai variabel independen.</p>		
	Perbedaan:	<p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen PDRB, belanja daerah, jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan pendapatan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel independen penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), PDRB, dan pengangguran serta kemiskinan sebagai variabel <i>intervening</i>.</p> <p>b. Pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2016-2021 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2017-2021.</p>		
2.	Diah Larasati (2018) ⁸⁴	Analisis Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, PDRB Per Kapita dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan	Regresi Data Panel	penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap IPM, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Dan secara simultan

⁸⁴ Larasati, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, PDRB Per Kapita Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2013-2016." (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

		Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2013 – 2016		variable ZIS, PDRB perkapita dan Kemiskinan berpengaruh terhadap IPM.
Persamaan:		<p>a. Terdapat variabel independen yang sama yaitu dana penyaluran ZIS dan PDRB.</p> <p>b. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel.</p>		
Perbedaan:		<p>a. Pada penelitian terdahulu variabel kemiskinan merupakan variabel independen namun pada penelitian saat ini variabel kemiskinan merupakan variabel intervening</p> <p>b. Tahun penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2013-2016 sedangkan penelitian saat menggunakan tahun 2017-2021</p> <p>c. Objek penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Indonesia sedangkan penelitian saat ini di Provinsi Jawa Barat.</p>		
3.	Mohammad Ilham Lathief (2019) ⁸⁵	Analisis Pengaruh ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan dan PDRB Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Provinsi Indonesia Periode 2014-2017	Regresi Data Panel	Dari hasil penelitian tersebut diketahui secara parsial variabel ZIS dan PDRB per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara variabel Belanja Daerah dan Kemiskinan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Secara simultan variabel ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan dan PDRB per Kapita berpengaruh

⁸⁵ Ilham, “Analisis Pengaruh ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan Dan PDRB Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 19 Provinsi Indonesia Periode 2014-2017.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2019), hlm 1. Diakses melalui <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1068/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-tahun-2018.html>.

				signifikan terhadap IPM dengan koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R-Square) sebesar 0.993.
Persamaan:		<p>a. Menggunakan regresi data panel.</p> <p>b. Terdapat variabel independen yang sama yaitu ZIS dan PDRB.</p>		
Perbedaan:		<p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen belanja daerah sedangkan pada penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.</p> <p>b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kemiskinan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian saat ini kemiskinan sebagai variabel <i>intervening</i>.</p> <p>c. Pada penelitian terdahulu menggunakan tahun 2014-2017 sedangkan pada penelitian saat ini tahun 2017-2021.</p> <p>d. Pada penelitian terdahulu objek penelitian di 19 Provinsi di Indonesia sedangkan penelitian saat ini di Provinsi Jawa Barat.</p>		
4.	Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa dan Nurul Huda (2020) ⁸⁶	Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam	Regresi Data Panel	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM tahun penelitian. Kemiskinan dan pengangguran mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemakmuran hidup

⁸⁶ Ningrum, Khairunnisa, and Huda, "Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020).

				<p>masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang akan mempunyai kecenderungan untuk meningkatnya kemiskinan. Sedangkan variabel lain pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM.</p>
Persamaan:				<p>a. Menggunakan regresi data panel. b. Terdapat variabel independen yang sama yaitu pengangguran.</p>
Perbedaan:				<p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kemiskinan sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian saat ini kemiskinan sebagai variabel <i>intervening</i>. b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kemiskinan, tingkat pengangguran pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel independen penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), PDRB, dan pengangguran, c. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di Indonesia sedangkan penelitian saat ini di Provinsi Jawa Barat.</p>

5.	Immanuel Andre Aditya, Sishadiyati dan Mohammad Wahed (2019) ⁸⁷	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Bali	Regresi linear berganda dengan variabel intervening	Hasil penelitian tersebut diketahui pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung, dan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung, sedangkan pendapatan asli daerah dan pengangguran melalui kemiskinan sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali.
Persamaan:		<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengangguran. b. Menggunakan data sekunder. c. Menggunakan variabel intervening Kemiskinan. 		
Perbedaan:		<ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian terdahulu mengguna data <i>time series</i> sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan data panel. b. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah sedangkan pada penelitian saat ini tidak menggunakan penelitian tersebut. c. Objek Penelitian penelitian terdahulu di Provinsi Bali, sedangkan penelitian saat ini di Provinsi Jawa Barat. 		

⁸⁷ Imanuel Andre Aditya, Sishadiyati, and Mohammad Wahed, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali," *Jurnal Randai* 2, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.31258/randai.2.1.p.1-10>.

6.	Nakiyah (2018) ⁸⁸	Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2012-2016.	Regresi Linear Sederhana	Hasil analisis data variabel ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan di Provinsi Banten tahun 2012-2016.
Persamaan:		<p>a. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>b. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah).</p>		
Perbedaan:		<p>a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel independen sedangkan penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independen.</p> <p>b. Menggunakan Model regresi linear sederhana menggunakan SPSS, sedangkan pada penelitian sekarang regresi data panel menggunakan Eviews. Objek penelitiannya di Provinsi Banten tahun 2012-2016, sedangkan penelitian sekarang di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.</p>		
7.	Luthfiah Nazmi (2021) ⁸⁹	Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Infak dan Sedekah dan Jumlah Penerima Jaminan Sosial Terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Aceh	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana zakat, infak dan sedekah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Jumlah penerima program keluarga harapan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun

⁸⁸ Nakiyah, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq Dan Shodaqah) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2012-2016." (Skripsi), Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

⁸⁹ L Nazmi, "Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dan Jumlah Penerima Jaminan Sosial Terhadap Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Aceh," (Skripsi), UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2021.

				berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemiskinan mampu memediasi pengaruh jumlah dana zakat infak dan sedekah terhadap indeks pembangunan manusia namun kemiskinan tidak mampu memediasi pengaruh jumlah penerima program keluarga harapan terhadap indeks pembangunan manusia di Aceh.
Persamaan:				<ol style="list-style-type: none"> Terdapat variabel independen yang sama yaitu dana zakat. Menggunakan analisis jalur menggunakan sobel test.
Perbedaan:				<ol style="list-style-type: none"> Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen jumlah penerima program keluarga harapan sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut. Pada penelitian terdahulu kemiskinan sebagai variabel dependen dan IPM sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian saat ini kemiskinan sebagai variabel intervening dan IPM sebagai variabel dependen. Objek penelitian terdahulu di Aceh sedangkan penelitian saat ini di Jawa Barat.

Berdasarkan tabel 2.2 Kebaharuan (novelty) atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat perbedaan yaitu penggunaan model dalam penelitian ini menggunakan variabel *intervening*, yaitu

menggunakan variabel kemiskinan sebagai variabel *intervening*, karena dengan menggunakan variabel ini bisa menjelaskan dan memahami hubungan antara dua variabel, yang tidak langsung mempengaruhi timbulnya atau berubah variabel dependen. Variabel *intervening* berada di antara variabel independen dan variabel dependen, dan membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel independen memengaruhi variabel dependen serta tahun dan objek yang berbeda, dimana penelitian ini mengambil tahun 2017-2021 dan mengambil objek di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan variabel penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), PDRB, dan pengangguran sebagai variabel independen, dengan menggunakan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan peneliti, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat adalah Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), PDRB, Pengangguran dan Kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi isu yang signifikan dalam upaya pembangunan. Tingginya tingkat kemiskinan akan meningkatkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Selain itu, diperkirakan bahwa kemiskinan dapat menghambat Indeks Pembangunan

Manusia. Hal ini di dukung oleh penelitian Penelitian ini sejalan dengan dilakukan oleh Nadia (2022) bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh kemiskinan.⁹⁰ Serta penelitian Trisno dkk (2022) bahwa angka kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka IPM semakin meningkat.⁹¹

Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathief bahwa pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di 19 provinsi Indonesia periode tahun 2014 hingga 2017. Hal ini mengartikan bahwa ketika dana ZIS dikelola secara baik dan optimal serta didistribusikan tepat sasaran, maka kualitas pembangunan manusia meningkat.⁹² Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Eris dkk bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan,

⁹⁰ Nadia Sholihah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021," (Skripsi) Universitas Islam Indonesia, 2022.

⁹¹ Tahan Upoyo Trisno, Munajat, and Yetty Oktarina, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020," *Jurnal Bakti Agribisnis* 7, no. 02 (2021): 25–32, <https://doi.org/10.53488/jba.v7i02.128>.

⁹² Mohammad Ilham, "Analisis Pengaruh ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan Dan PDRB Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 19 Provinsi Indonesia Periode 2014-2017," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2019), hlm 1. Diakses melalui <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1068/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-tahun-2018.html>. tanggal 10 September 2023.

Artinya jika penyaluran dana ZIS meningkat maka kemiskinan akan menurun.⁹³

PDRB per kapita juga dianggap sebagai salah satu elemen yang memiliki dampak pada tingkat kesejahteraan manusia. Apabila PDRB per kapita suatu daerah meningkat, hal ini akan mencerminkan peningkatan dalam ekonomi masyarakat tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati bahwa PDRB Per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal tersebut berarti jika variabel PDRB per Kapita meningkat maka akan meningkat pula variabel IPM.⁹⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Reni dkk bahwa PDRB berpengaruh terhadap Kemiskinan. Hal Ini berarti bahwa ketika PDRB semakin tinggi, maka akan berpengaruh kepada penurunan nilai Kemiskinan, demikian pula sebaliknya.⁹⁵

Serta masalah Tingkat pengangguran juga dapat berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran juga dijelaskan oleh Todaro dalam jurnal Mahroji bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern

⁹³ Nila Munandar, Eris; Amirullah, Mulia; Nurochman, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan," *Al-Mal : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 01, no. 01 (2020), hlm. 25–38.

⁹⁴ Diah Larasati, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, PDRB Per Kapita Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2013-2016" (Skripsi) UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

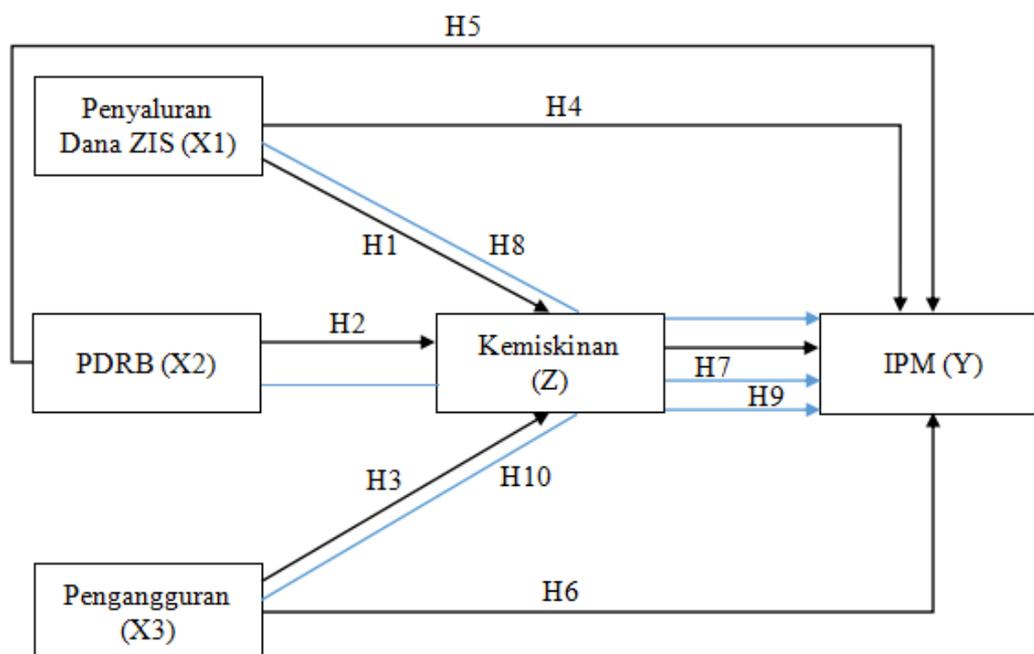
⁹⁵ Reni Ria Armayani Hasibuan et al., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (2022), hlm. 683–693.

untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.⁹⁶ Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dkk bahwa kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Kemiskinan dan pengangguran mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang tinggi akan mengurangi kesejahteraan masyarakat hidup masyarakat melalui berkurangnya pendapatan masyarakat yang akan mempunyai kecenderungan untuk meningkatnya kemiskinan.⁹⁷

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh variabel-variabel independen Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), PDRB dan Pengangguran terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan terhadap variabel *intervening* yaitu kemiskinan. Kerangka berpikir yang akan dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Dwi Mahroji and Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>.

⁹⁷ Ningrum, Khairunnisa, and Huda, "Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 6 No 2, hlm. 212-222.



Keterangan :

- : Pengaruh Langsung
- : Pengaruh Tidak Langsung

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁹⁸ Berdasarkan

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), hlm. 64.

uraian kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H_{01} : Penyaluran Dana ZIS tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a1} : Penyaluran Dana ZIS berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021.

2. Hipotesis 2

H_{02} : PDRB tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a2} : PDRB berpengaruh terhadap Indeks Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021.

3. Hipotesis 3

H_{03} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021

H_{a3} : Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2021.

4. Hipotesis 4

H_{04} : Penyaluran Dana ZIS tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a4} : Penyaluran Dana ZIS berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

5. Hipotesis 5

H_{05} : PDRB tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a5} : PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

6. Hipotesis 6

H_{06} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a6} : Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

7. Hipotesis 7

H_{07} : Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a7} : Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

8. Hipotesis 8

H_{08} : Penyaluran Dana ZIS tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a8} : Penyaluran Dana ZIS berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

9. Hipotesis 9

H_{09} : PDRB tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a9} : PDRB berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

10. Hipotesis 10

H_{010} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

H_{a10} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.